

Geopolitical Codes di Asia Tenggara dalam Geopolitical Structures Indo-Pasifik

Gita Karisma¹, Iwan Sulistyio²

^{1,2} *International Relations Department, University of Lampung, Indonesia*

SUBMISSION TRACK

Received : 15 February 2021
Final Revision : 07 October 2021
Available Online : 01 November 2021

KEYWORD

Geopolitics, Indo-Pacific, Southeast Asia, AOIPs, FOIP

KATA KUNCI

Geopolitik, Indo-Pasifik, Asia Tenggara, AOIPs, FOIP

CORRESPONDENCE

E-mail : iwsulistyio@gmail.com
iwan.sulistyio@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

This study examines how the geopolitics of Southeast Asia after the Indo-Pacific linked to “the framework of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific”. The authors use the concepts covering geopolitical agents, geopolitical structures, and geopolitical codes to elaborate the activities of various actors in Southeast Asia related to power and geography and their choices. The previous study of geopolitics in Southeast Asia tended to emphasize the maritime-oriented. However, this research finds that the geopolitics is dynamics and states as the agents may consider certain choices whither, they stand to. States not only divine maritime aspect, but also economic and political. By using qualitative-descriptive method, the authors find that the states remain more dominant than others agents. Southeast Asia's geopolitic is used to be quite neutral; then it is tested and turned fragmented while facing the structure of “the US Indo Pacific and the Free and Open Indo-Pacific” (FOIP). The geopolitics of Southeast Asia has been facing a challenge coming from inconsistency support of ASEAN's member states as agents toward the ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIPs)

ABSTRAK

Studi ini mengkaji bagaimana geopolitik Asia Tenggara pasca-Indo-Pasifik dikaitkan dengan kerangka ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Penulis menggunakan konsep yang meliputi geopolitical agents, geopolitical structures, and geopolitical codes guna mengelaborasi aktivitas pelbagai aktor di Asia Tenggara terkait kekuatan dan realitas geografis serta pilihan mereka. Kajian geopolitik di Asia Tenggara sebelumnya cenderung menekankan pada orientasi maritim. Namun, penelitian ini menemukan bahwa geopolitik bersifat dinamis dan negara sebagai agent dapat mempertimbangkan pilihan tertentu kemana mereka akan berpihak. Negara tidak hanya mempertimbangkan aspek maritim, tetapi juga ekonomi dan politik. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penulis menemukan bahwa negara masih dominan daripada agent lainnya. Geopolitik Asia Tenggara biasanya cukup netral; kemudian diuji dan terfragmentasi saat menghadapi struktur Indo Pasifik AS dan Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP). Geopolitik Asia Tenggara menghadapi tantangan yang datang dari inkonsistensi dukungan negara-negara anggota ASEAN sebagai agen terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIPs).

Pendahuluan

Beberapa tahun belakangan ini, sejumlah negara mulai aktif memikirkan gagasan Indo-Pasifik dengan merancang alternatif kerja sama dan langkah kepemimpinan baru. Indo-Pasifik mengacu kepada wilayah maritim yang terbentang dari Samudra Hindia sampai Pasifik Barat, yaitu Asia termasuk Asia Barat/Timur Tengah hingga Eastern Afrika.¹ Gagasan ini tidak hanya memunculkan satu definisi kawasan baru dalam interaksi negara di dunia, tetapi juga memberikan pilihan lain untuk dapat mengatur, memimpin, dan bahkan meraih keuntungan atas wilayah ini. Khurana menjelaskan bahwa Indo-Pasifik secara geopolitis memiliki nilai ekonomis. Dalam artikelnya, “*Security of Sea Lines: Prospects for India-Japan Cooperation*”, ia mengungkapkan bahwa India dan Jepang, jika bersama, dapat menjadi pemain sentral dalam mencapai stabilitas dan keamanan di Asia.² Beragam respons diberikan negara; dimulai dari lahirnya “*The Quadrilateral Security Dialog*” yang diinisiasi oleh Australia, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan India. Jepang dan AS kemudian mengukung konsep “*A Free and Open Indo Pacific*”.

Selanjutnya, Asia Tenggara sendiri mulai mencari arah dan menyuarakan prinsip inklusivitas, netralitas, dan dialog dalam menanggapi kerangka kerja sama ini. Sejarah mencatat, setidaknya pasca-Perang Dingin, kerangka kerja sama antar-Pasifik cukup banyak lahir dari organisasi regional Asia Tenggara, yaitu “*the Association of Southeast Asian Nations*” (ASEAN). Beberapa diantaranya ialah “*The ASEAN Regional Forum*” (ARF), “*the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus*” (ADMM-Plus), “*the ASEAN Maritime Forum*”

(EAMF), dan “*the East Asia Summit*” (EAS). EAS, terutama yang dimaksudkan untuk menempatkan ASEAN sebagai *host* dan *driver*³, harus menghadapi tantangan dengan lahirnya kerja sama Indo-Pasifik. Hal ini membuat posisi ASEAN kembali harus diuji. Bagaimanapun, sikap dan pandangan negara-negara di Asia Tenggara akan turut dipengaruhi oleh bagaimana sikap dan pandangan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.

Pada Juni 2019, negara-negara ASEAN menyepakati garis kebijakan ihwal Indo-Pasifik atau disebut “*ASEAN Outlook on Indo-Pacific*”.⁴ Dokumen ini berisi penegasan kembali posisi sentralitas dan netralitas ASEAN dalam mempromosikan kerja sama Indo-Pasifik.⁵ Selain itu, ASEAN juga memberikan pernyataan bahwa ASEAN Outlook on Indo-Pacific dimaksudkan untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran.⁶ Dokumen ini mengisyaratkan, kawasan Asia Tenggara telah memikirkan posisi dan peran mereka dalam geopolitik Indo-Pasifik, terlebih geopolitik Indo-Pasifik sedikitnya telah memengaruhi geopolitik Asia Tenggara.

Perkembangan geopolitik Asia Tenggara salah satunya dibahas oleh Bert Chapman lewat “*Geopolitics: a Guide to the Issues*”. Chapman mengemukakan sejumlah *geopolitical hot spots* di masa kini dan yang tengah berkembang; salah satunya ialah Asia Tenggara. Ia memberi penekanan pada Selat

¹ Gurpreet S. Khurana, “Security of Sea Lines: Prospects for India–Japan Cooperation,” *Strategic Analysis*, 31:1, 139–153 (2007): 150.

² *Ibid.*, 140.

³ Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN Plus Three Summit, Kuala Lumpur (12 December 2005)

⁴ Konsep-indo-pasifik-asean-dan-kepemimpinan-indonesia. <http://setnas-asean.id/news/read/konsep-indo-pasifik-asean-dan-kepemimpinan-indonesia> (diakses pada Februari 2020)

⁵ Poin 4 dan 5 dalam dokumen final ASEAN Outlook on Indo-Pacific. https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf (diakses pada Agustus 2020)

⁶ Poin 9 dalam dokumen final ASEAN Outlook on Indo-Pacific diakses melalui https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf

Malaka untuk isu *maritime piracy* (pembajakan di laut) dan upaya saling klaim atas Laut Tiongkok Selatan; keduanya telah memengaruhi geopolitik negara-negara di Asia Tenggara.⁷

Dalam konteks tersebut, artikel ini menjelaskan geopolitik Asia Tenggara yang termanifestasi dari *geopolitical codes* dan strategi negara-negara di Asia Tenggara dalam konteks struktur geopolitik Indo-Pasifik.

Metode Riset

Paparan ini adalah hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Data yang dimanfaatkan ialah data sekunder dari beragam buku, jurnal dan laman seperti la.emabassy, NIDS, FEAS, ASEAN, dan lain-lain. Data dianalisis dengan pendekatan *diachronic organization* yang berfokus pada cerita yang dibangun. Pendekatan ini hadir dengan “sifat melekat” dari orang yang mengatakan narasi, konteks darimana narasi dibuat, hubungan antarpencerita narasi, kesinambungan historis, dan organisasi kronologis kejadian.⁸

Diskusi

Konsep Geopolitik

Istilah *geopolitics* (geopolitik) pertama kali diciptakan oleh seorang pakar ilmu politik Swedia, Rudolf Kjellen, pada 1899.⁹ Secara umum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Colin Flint, seorang *associate professor* pada the University of Illinois, AS, *geopolitics* adalah kajian tentang bagaimana geografi menyediakan pelbagai kesempatan dan batasan bagi tindakan yang diambil oleh negara-negara,

kelompok-kelompok nasional, serta organisasi-organisasi teroris.¹⁰ Dengan kata lain, masih menurut Flint, “*geopolitics is the practice of states controlling and competing for territory*”.¹¹

Tiga konsep utama yang digunakan adalah *geopolitical agents*, *geopolitical structure*, dan *geopolitical actors*. Dalam konteks cara pandang yang klasik, suatu negara dipandang sebagai sebuah *agent* dimana *agency*-nya terlihat; contohnya, pada negosiasi perdagangan yang dilakukan. Menurut Flint, aktor geopolitik tidak hanya negara, tetapi juga individu, korporasi, NGOs, dan kelompok-kelompok kepentingan lain di kawasan; masing-masing mereka tidaklah terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi justru saling berjaln/terhubung, dimana setiap *agent* akan meraih/mengejar *goals* dan pilihan mereka atas dasar konteks geopolitis tertentu.¹²

Structure, masih merujuk Flint, didefinisikan sebagai “seperangkat aturan (yang formal sebagai beragam aturan atau hukum yang dapat ditegakkan) serta norma-norma (praktik yang dapat diterima secara budaya) yang sebagian menentukan apa yang bisa dan tidak bisa, selayaknya dan tidak selayaknya, dilakukan”; Dengan kata lain, *structures* merupakan ekspresi dari kekuatan sebagaimana yang mereka maknai terkait apa yang diperkenankan dan apa yang diharapkan.¹³ *Structure* dan *agency* sendiri adalah dua hal yang sangat terkait. Dalam konteks ini, serangkaian proposisi esensial di dalam relasi kedua hal tersebut:¹⁴

- *Agents* tidak dapat bertindak secara bebas, tetapi mereka mampu membuat pelbagai pilihan;
- *Agents* bertindak di dalam *structures*;
- *Structures* membatasi, ataupun memaksa/mendesak, kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan *agents*;

⁷ Bert Chapman, *Geopolitics: a Guide to the Issues* (Santa Barbara: Praeger, 2011), 69 dan 74.

⁸ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 271.

⁹ Gearóid Ó Tuathail, “Introduction: Thinking Critically about Geopolitics” di dalam Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby, and Paul Routledge, *The Geopolitics Reader* (New York: Routledge, 1998), 1.

¹⁰ Colin Flint, *Introduction to Geopolitics* (New York: Routledge, 2006), i.

¹¹ *Ibid.*, 13.

¹² *Ibid.*, 25.

¹³ *Ibid.*, 26.

¹⁴ *Ibid.*

- *Structures* juga memfasilitasi *agents*, atau dengan kata lain, *structures* menyediakan berbagai kesempatan bagi *agents* guna meraih tujuan-tujuan mereka;
- Suatu *agent* pun bisa jadi merupakan sebuah *structure* dan sebaliknya.

Sementara itu, *geopolitical codes* berarti cara dimana suatu negara mengorientasikan dirinya sendiri terhadap dunia.¹⁵ Dalam indikator yang lebih rinci, menurut Taylor dan Flint, setiap negara di dunia mendefinisikan *geopolitical codes*-nya atas dasar lima perhitungan utama, yaitu:

1. Siapa sekutu/aliansi yang sekarang dan sekutu/aliansi potensial mereka;
2. Siapa musuh yang sekarang dan musuh yang potensial;
3. Bagaimana negara-negara mengelola/mempertahankan sekutu/aliansinya serta memelihara sekutu/aliansi potensial mereka;
4. Bagaimana mereka mampu melawan/ menentang musuh-musuh yang sekarang dan pelbagai ancaman yang tengah berkembang;
5. Bagaimana negara-negara membenarkan keempat kalkulasi di atas kepada publik luas, dan kepada *global community*.

Richard Stubbs, di dalam jurnal internasionalnya yang berjudul “*Geopolitics and the Political Economy of Southeast Asia*” menulis, geopolitik di kawasan Asia Tenggara berkorelasi dengan sektor ekonomi, termasuk yang berhubungan dengan kepentingan hegemonik negara adikuasa, Jepang dan AS.¹⁶ Kawasan Asia Tenggara, khususnya Singapura, menjadi negara yang menerima manfaat besar dari geopolitik. Negara ini mengalami pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya

perkembangan ini dipicu oleh Perang Korea dan Perang Vietnam. Selain itu, Malaysia mendapatkan keuntungan dari Perang Korea sehingga negara ini menjadi target utama untuk investasi sumber daya dan infrastruktur.¹⁷ Thailand mendapatkan keuntungan dari AS untuk menghadapi serangan Vietnam sehingga Malaysia dan Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi Jepang untuk melakukan investasi dengan potensi yang dimiliki kedua negara tersebut dalam meningkatkan infrastruktur negara.

Geopolitik Indo-Pasifik

Geopolitik menjadi isu yang masih relevan hingga kini. Muncul beberapa skeptisme yang menyatakan, area dan perbatasan internasional tampak kurang berarti dalam memodifikasi persoalan manusia; sejumlah analis seperti Richard O'Brien bahkan mengacu pada 'End of Geography'.¹⁸ Akan tetapi, beberapa masalah tidak lantas menafikan pentingnya aspek geografi, begitu juga dalam kasus Indo-Pasifik. Negara masih membutuhkan pertimbangan geografi terkait, cost dan pemetaan mitra.

Menurut Khurana, istilah *Indo-Pacific* merupakan konsep yang masih terbuka, didefinisikan dan digunakan oleh beberapa negara berdasarkan kepentingannya.¹⁹ Meskipun begitu, persamaan mengenai cakupan geografis atas wilayah ini relatif sama, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai wilayah yang bersebelahan. Sebagai sebuah gagasan pemetaan kawasan baru, konsep ini semakin mengemuka saat beberapa negara besar seperti Jepang, India, dan AS mulai menanggapi konsep ini dengan menawarkan beragam perspektif mereka. Ia juga semakin banyak dibahas di lembaga kajian dan

¹⁵ *Ibid.*, 55.

¹⁶ Richard Stubbs. *Geopolitics and the Political Economy of Southeast Asia*. International Journal, Vol. 44, No. 3, Southeast Asia Ascendant (Kanada: Sage Publications, 2016).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Klaus Dodds, *Geopolitics: A very short introduction*. (Oxford: Oxford University Press, 2007), 182.

¹⁹ Yunanto and Samhudi, "Different Interests Explain Different Proposals," *Global Strategis Journal*, Vol.3 No.2. (2019): 2.

institusi akademis, dan menjadikannya sebagai nomenklatur geopolitik.

Kawasan Indo-Pasifik, memiliki nilai yang tidak hanya berarti secara ekonomi, tetapi juga keamanan. Bagaimanapun, Samudera Hindia dan Pasifik merupakan wilayah laut yang selama ini digunakan sebagai jalur perdagangan barang dan energi. Kebijakan *One Belt-One Road* China semakin menegaskan pentingnya wilayah ini secara geo-ekonomi. Di samping itu, konflik, terutama di wilayah Laut Cina Selatan, serta kebijakan keamanan laut oleh Tiongkok menyebabkan kawasan ini tidak luput dari pengawasan negara besar. Keberadaan negara dengan kekuatan besar seperti AS, China, Jepang, India secara geografis menjadikan kawasan ini menentukan stabilitas bagi negara-negara di kawasan ini serta seluruh dunia. Berbagai isu kejahatan transnasional seperti pembajakan dan terorisme juga sering terjadi, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai fokus dalam agenda strategi keamanan dan pertahanan negara-negara di sekitar.

FOIP dan AOIPs sebagai Struktur Geopolitik Indo-Pasifik

Sebagai gagasan geopolitik baru, Indo-Pasifik turut menggeser struktur geopolitik lama yang selama ini ada. Geopolitik Asia Tenggara selama ini, sebagaimana yang telah dikemukakan Chapman, cenderung di-pengaruhi oleh isu maritim dan negara di Asia Tenggara cenderung merangkul semua negara besar dengan bersikap netral. Akan tetapi, hal ini mulai berubah sejak munculnya gagasan Indo-Pasifik. Negara besar di luar kawasan mulai semakin berani menunjukkan sikap dan membuat gagasan yang bukan menekankan pada sentralitas dan netralitas ASEAN. Negara besar seperti AS, India, dan Jepang dengan cepat merespons dan berupaya membentuk struktur baru atas Indo-Pasifik (*Indo-Pacific Geopolitical Structures*). Hal ini bahkan mendorong perubahan *geopolitical codes* negara-negara di Asia Tenggara. Gagasan Indo-Pasifik dalam

geopolitik kontemporer mulai menarik perhatian setelah pidato yang disampaikan Shinzo Abe di hadapan parlemen India pada Agustus 2007. Pidato tersebut terutama menggarisbawahi Indo-Pasifik, sebagai *seas of freedom and of prosperity* (kemakmuran bersama, ketertiban yang baik, dan stabilitas strategis).²⁰

Tidak lama setelah itu, lahirlah Dialog Keamanan antarempat negara besar, yaitu Australia, India, Jepang, dan AS atau yang disebut *The Quadrilateral Security Dialogue* pada tahun 2007. Dalam dialog ini ditekankan tiga prinsip yaitu, "*the rule of law, no recourse to the use or threat or force, freedom of navigation and overflight*".²¹ Kelompok ini kemudian mengalami kekosongan sejalan dengan pengunduran diri Shinzo Abe serta penarikan diri negara Australia atas pengaturan tersebut.

Konsep Indo-Pasifik mengemuka kembali pada tahun 2014, sejalan dengan meningkatnya intensitas ketegangan di Indo-Pasifik, seperti semenanjung Korea, Laut China Timur, Laut China Selatan, dan Selat Taiwan. Empat negara besar mulai memikirkan kembali posisi mereka. Misalnya, saat terjadi reklamasi Tiongkok di Laut China Selatan, Perdana Menteri Jepang dalam Dialog Shangri-La pada tahun 2014 menyerukan agar tiga prinsip "aturan hukum" berlaku di Indo-Pasifik yaitu: klarifikasi klaim berdasarkan hukum internasional, tidak menggunakan ancaman kekerasan dalam menegakkan klaim, dan penyelesaian sengketa teritorial secara damai.²² Indo-Pasifik salah satunya kuat dipengaruhi oleh konvergensi antara ketegangan Jepang dan India terhadap meningkatnya politik militer Tiongkok. Akibatnya, Jepang berupaya memperkuat

²⁰ Axel Berkofsky and Sergio Miracola (Ed), *Geopolitics By Other Means The Indo-Pacific Reality*. (Milano: Ledizioni LediPublishing, 2019), 17.

²¹ William Choong, *Indonesia, ASEAN and the Return of the Indo-Pacific Strategy* diakses melalui <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/indonesia-asean-return-indo-pacific-strategy/> pada 10 Juli 2020.

²² *Ibid.*

keamanan Garis Komunikasi Laut (SLOCs). India pun turut waspada terhadap eksistensi strategis Tiongkok yang dikabarkan sebagai “Untaian Mutiara” oleh Booz Allen Hamilton yang berpotensi menjadi pangkalan militernya di Samudra Hindia.²³

Selanjutnya, adalah negara Amerika Serikat, melalui Presiden AS Donald Trump pada KTT APEC November tahun 2017 di Da Nang, menggunakan frasa *The Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) untuk pertama kali. Strategi Indo-Pasifik AS dirilis tahun 2018, yang sebetulnya melanjutkan ide Jepang pada awal tahun 2007. Strategi Indo-Pasifik dalam perspektif AS adalah mempromosikan sistem global di mana negara-negara bebas untuk melindungi kedaulatan mereka dari paksaan dan dapat menjalankan kebijakan pemerintahan yang baik, transparansi dan anti korupsi, dan terbuka untuk komunikasi, infrastruktur, perdagangan dan investasi.

Pada Juni 2019, AS merilis *Indo-Pacific Strategy Report* (IPSR) bersamaan dengan penyampaian pidato pleno Penjabat Menteri Pertahanan Patrick Shanahan di Shangri-La Dialogue. IPSR adalah dokumen strategi AS yang counter terhadap Tiongkok, tetapi sangat disayangkan dokumen ini kurang memuat strategi bersama dan koheren di antara empat negara Quad Indo-Pasifik. Akibatnya, beberapa strategi yang ditawarkan oleh Indo-Pacific Four, bergantung pada konseptualisasi mereka masing masing tentang Indo-Pasifik, pengelolaan ancaman China, kerja sama pertahanan dan keamanan maritim, serta konektivitas.²⁴

Sementara itu, ASEAN, yang dipelopori Indonesia, juga mengeluarkan konsep Indo-Pasifik yang menekankan pada sentralitas dan inklusifitas ASEAN. Konsep ini disebut “*ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIPs), yaitu *ASEAN Centrality, inclusivity,*

dan *complementarity*”²⁵ disahkan dalam KTT ASEAN ke-34 pada Juni 2019, dirilis oleh ASEAN pada tahun 2019. Beberapa yang mendasari lahirnya dokumen ini ialah karena: pertama, muncul kekhawatiran ASEAN tentang sentralitas AS yang cenderung mengecualikan Tiongkok. Strategi Indo-Pasifik sebagian besar dilihat sebagai respons AS dan sekutunya terhadap kebangkitan Tiongkok. Asia Tenggara memiliki ketidaknyamanan yang mereka rasakan atas retorika AS dalam FOIP (*free and open Indo-Pacific*), yang mereka kaitkan dengan memaksa wilayah tersebut untuk memilih antara AS dan Tiongkok.²⁶ ASEAN tentu tetap ingin menjaga stabilitas di kawasan, menjadi tidak dilupakan ataupun tertekan diantara rivalitas AS-Tiongkok, serta tetap mampu membawa ASEAN untuk tidak ikut begitu saja konsep AS sekaligus mempunyai peran di Indo-Pasifik.

Geopolitical Actors di Asia Tenggara dalam Geopolitik Indo-Pasifik

Menurut Flint, geopolitik adalah tindakan negara dalam mengontrol dan berkompetisi terkait teritori.²⁷ Dalam beberapa kajian geopolitik, muncul *non state* sebagai aktor baru dalam geopolitik. Akan tetapi, dalam dinamika konstruksi geopolitik Indo-Pasifik, aktor yang berperan besar masih pada tataran negara dan *governmental organization*. Secara garis besar berdasarkan pemaparan sejarah di atas, maka aktor dalam geopolitik Indo-Pasifik dapat dibagi menjadi

²⁵ Asean outlook Indo Pasifik diperkenalkan pada Kanada, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/821/berita/asean-outlook-on-indo-pacific-diperkenalkan-kepada-kanada#:~:text=ASEAN%20Outlook%20on%20Indo%20DPacific%20merupakan%20penegasan%20posisi%20ASEAN%20dalam,Asia%20Pasifik%20dan%20S%20amudera%20Hindia.> (diakses pada 18 Juli 2020)

²⁶ Huong Le Thu. *The long and winding way to the Indo-Pacific*. Diakses melalui <https://www.aspistrategist.org.au/the-long-and-winding-way-to-the-indo-pacific/> pada 20 Juli 2020.

²⁷ Colin Flint, *Introduction to Geopolitics* (New York: Routledge, 2006), i.

²³ Axel Berkofsky and Sergio Miracola (Ed). 2019. *Geopolitics By Other Means The Indo-Pacific Reality*. (Milano: Ledizioni LediPublishing, 2019), 17.

²⁴ *Op.cit.*, William Choong.

dua, yaitu negara dan organisasi pemerintah (*governmental organization*). Beberapa negara yang memegang peranan sentral sebagaimana dijelaskan adalah AS, Jepang, India, Australia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sembilan negara ini merupakan aktor yang cukup responsif terhadap gagasan Indo-Pasifik. Bahkan, lebih jauh, mereka memiliki posisi serta sikap tertentu terhadap struktur Indo Pasifik, dimana di satu sisi ada struktur AS dengan *The Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) dan disisi lain ada struktur Asia Tenggara dengan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIPs). Selain aktor negara, juga terdapat setidaknya dua organisasi yang aktif dalam gagasan Indo-pasifik, yaitu ASEAN dan *The Quadrilateral Security Dialogue*. Namun, sembilan negara tetap menjadi lebih dominan karena sebagai agen, negara membuat keputusan dan pilihan tersendiri atas organisasi yang ada di kawasan Indo-Pasifik.

Sebagian aktor memiliki cara pandang militer dan pertahanan dalam melihat Indo-Pasifik. Ini tercermin dari sikap dan cara pandang, misalnya, Singapura dan Australia. Australia berasumsi dirinya ditempatkan secara geostrategis dalam kontinum Indo-Pasifik dalam waktu yang lama. Pemerintah Australia mengartikulasikan pentingnya konsep tersebut dalam “Buku Putih Pertahanan” yang mendeskripsikan pernyataan resmi tentang Indo-Pasifik kontemporer. Buku putih itu memunculkan dua faktor dari latar belakang konsep yang ada di antaranya: kemunculan India sebagai aktor strategis, diplomatik, dan ekonomi yang baik dan turut aktif dalam kerangka regional serta pertumbuhan perdagangan, investasi, dan aliran energi yang mendorong kekuatan hubungan ekonomi dan keamanan sehingga dengan dua faktor ini memicu perhatian

dunia internasional terhadap Samudera Hindia.²⁸

Ada juga yang mulai menggeser cara pandang dari militer ke ekonomi, contohnya adalah Filipina dan Jepang. Jepang dalam beberapa isu strategis mendekat kepada AS, Srilanka dan India, ini melibatkan proyek energi sedangkan di Asia Tenggara dalam kerangka Indo-Pasifik, Jepang lebih banyak membuat proyek transfer pengetahuan dan infrastruktur saja.²⁹ Ada juga yang beranggapan bahwa Jepang menerapkan strategi hedging. Yang lainnya, adalah Indonesia misalnya, sangat bertumpu pada sikap politis atas wilayah Indo Pasifik. Ada beberapa negara dan dua organisasi regional yang menjadi aktor sentral (*geopolitical actor*) di kawasan Indo-Pasifik, diantaranya kelompok “*Quadrilateral Security Dialogue*”, terdiri dari, AS, Jepang, India dan Australia, kedua, ASEAN yang didominasi oleh Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand. Aktor inilah yang mempengaruhi struktur geopolitik Indo-Pasifik.

Sebagai akibat interaksi dari beberapa aktor sentral tersebut memunculkan dua bentuk *geopolitical structures* dalam ranah Indo-Pasifik, struktur pertama, yang melibatkan AS dan Jepang dimana AS memiliki peran sentral atas ide Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas (FOIP). Struktur kedua, adalah keinginan Indonesia dan beberapa negara ASEAN untuk mengambil posisi sentral dan netral di kawasan ini, artinya tidak menempatkan siapapun di luar atau pun satu satunya pemimpin di Indo-Pasifik. Secara normatif, AS menekankan pada sikap bebas untuk melindungi kedaulatan negara. Sedangkan ASEAN memberikan kerangka untuk memandang Indo-Pasifik sebagai wilayah kerjasama berbasis dialog.

²⁸ Axel Berkofsky and Sergio Miracola (Ed), *Geopolitics By Other Means The Indo-Pacific Reality*, (Milano: Ledizioni LediPublishing, 2019), 23.

²⁹ The Government of Japan. Towards Free and Open Indo-Pacific. <https://www.mofa.go.jp/files/000407643.pdf>, (diakses pada 13 Agustus 2020).

Indonesia sendiri, kendatipun secara normatif, tampaknya masih selalu mengedepankan posisi netral terkait konsep Indo-Pasifik mengingat prinsip dasar luar negerinya yang bebas-aktif;³⁰ namun, dimensi kepentingan ekonomi akan senantiasa menjadi dasar dalam mempertimbangkan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh Jakarta.³¹

Geopolitical Codes: Keberpihakan Filipina & Singapura

Di Asia Tenggara, terdapat setidaknya dua negara yang memperlihatkan pergeseran sikap dari sebelum lahirnya FOIPs dan AOIPs., yakni Singapura dan Filipina.

Di luar gagasan Indo Pasifik, Singapura sebetulnya memiliki kedekatan baik dengan AS maupun Tiongkok. Dalam bidang perdagangan barang, Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar Singapura, dan AS merupakan negara importir terbesar ketiga bagi Singapura.³² Namun, Singapura misalnya pada tahun 2018, mempunyai defisit neraca perdagangan sebesar minus US\$946.129.553 dengan AS, sebaliknya neraca perdagangan antara Singapura dan Tiongkok tidak defisit.³³ Singapura juga merupakan salah satu mitra BRI (*Belt and Road Initiatives*) terpenting bagi Tiongkok karena nilai strategis selat Malaka. Agaknya hal ini menyebabkan Singapura tidak begitu mengkhawatirkan hubungannya dengan Tiongkok. Singapura nampaknya juga

mengagendakan penguatan kerja sama perdagangan dengan AS. Lebih dari itu, Singapura memiliki kecenderungan kepentingan keamanan dengan AS.

Dalam konteks Indo-Pasifik, Singapura terlihat memiliki kecenderungan untuk mendekat kepada Amerika Serikat, Jepang dan India. Beberapa perjanjian kerjasama keamanan dengan AS semakin ditingkatkan oleh Singapura. Pada 23 September 2019, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dan Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perjanjian untuk memperbarui Nota Kesepahaman 1990 (*Memorandum of Understanding Regarding United States*) mengenai Penggunaan Fasilitas AS di Singapura, dan memperpanjangnya selama 15 tahun lagi. AS bahkan sebelumnya (tahun 2013 dan 2015) telah secara gradual mengerahkan pesawat tempurnya dalam rangka latihan, pemeliharaan, serta proses pengisian bahan bakar kapal tempur untuk wilayah pesisir dan pesawat P-8 Poseidon-nya ke Singapura. Lebih dari sekedar kerja sama bilateral semata, hal ini menunjukkan ada kesamaan persepsi mengenai konsep Indo-Pasifik diantara Singapura dengan AS.

Kementerian Pertahanan Singapura menyatakan, pemutakhiran dokumen tersebut menegaskan kembali sokongan untuk kehadiran AS di wilayah Asia-Pasifik, yang masih krusial bagi upaya perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran kawasan.³⁴ Singapura juga mempunyai kerja sama logistik dengan India. Contoh peluang yang diberikan oleh perjanjian pertukaran logistik adalah penyebaran pesawat pengintai maritim P-8I India ke France's Réunion, sebuah pulau di Samudera Hindia³⁵ Ketertarikan AS dan India pada Singapura dapat menjadi peluang bagi Singapura untuk

³⁰ Lihat Kemenlu RI, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/539/berita/peran-sentral-indonesia-pada-asean-outlook-on-indo-pacific>, diakses pada 30 Desember 2022.

³¹ Lihat pendapat Kiki Verico, The National Bureau of Asian Research, <https://www.nbr.org/publication/how-indonesia-sees-the-indo-pacific-economic-architecture/>, diakses pada 30 Desember 2022.

³² WTO, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/SG_e.pdf (diakses pada 15 Agustus 2020).

³³ <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/SGP/Year/LTST/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country> (diakses pada 19 Agustus 2020).

³⁴ Channel News Asia, <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/p-m-lee-president-trump-renew-mou-on-us-use-of-military-11936182> (diakses pada 4 Agustus 2020).

³⁵ Darshana M Baruah, *India in the Indo-Pacific: New Delhi's Theater of Opportunity*, (Washington: Carnege Endowment For International Peace, 2020), 24.

menjadikan negara ini sebagai aliansi potensial khususnya atas kepentingan keamanan Singapura.

Pada isu Indo-Pasifik terkait AOIPs, Singapura beberapa kali menunda untuk menyetujui konsep Indo-Pasifik rancangan ASEAN. Dalam kasus perumusan konsep Indo-Pasifik bagi ASEAN, Singapura telah menjadi negara yang paling akhir menyepakati konsep Indo-Pasifik ASEAN atau yang disebut *The 'ASEAN outlook on the Indo-Pacific'*. Singapura berpendapat bahwa konsep ini masih perlu dibahas lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan, 'Kami tidak akan pernah menandatangani apa pun kecuali kami tahu persis apa artinya.'³⁶

Pada akhirnya, Singapura menyetujui ASEAN Outlook, tetapi dari pengalaman ini dapat dilihat bahwa Singapura sebetulnya tidak begitu cenderung pada struktur Indo-Pasifik milik ASEAN. Di seluruh Asia Tenggara, ada kebingungan tentang apa sebenarnya arti strategi Indo-Pasifik. Strategi — atau, lebih tepatnya, strategi Indo-Pasifik belum cukup dijelaskan dan nomenklatur serta cakupan geografis 'Indo-Pasifik' kurang jelas. Orang Asia Tenggara tidak mau merujuk ke FOIP versi AS dan Jepang atau menggunakan istilah itu karena mereka belum yakin apa yang disyaratkan dalam FOIP.³⁷ Akan tetapi, Singapura juga sebetulnya tidak memahami secara jelas dokumen AOIP's milik ASEAN. Atas alasan inilah maka Singapura membutuhkan waktu lama untuk menyepakati AOIP's.

Filipina mempunyai sikap penyesuaian *balancing* yang sama dengan Singapura, namun negara ini justru menggeser kecendrungan dari yang berpihak pada AS menjadi dekat dengan Tiongkok. Secara tegas, Filipina sebetulnya tidak menolak konsep Indo-Pasifik FOIP AS secara langsung, namun ketegangan diantara

kedua negara akhir akhir ini menjadikan jelas Filipina memilih menjauh dari AS.

Sebagai salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara, Filipina berkepentingan untuk isu keamanan maritim kawasan. Filipina bahkan tidak hanya mencoba melindungi teritorinya, melainkan juga menghadapi konflik perbatasan wilayah di kawasan Indo-Pasifik, yaitu konflik Laut China Selatan. Beberapa musuh potensial bagi Filipina adalah Tiongkok, Taiwan, dan juga AS. Meskipun dipandang sebagai musuh potensial sekaligus menjadi teman aliansi potensial bagi Filipina, Tiongkok telah memulai strategi keamanan laut salah satunya militerisasi jalur air di sekitar *Spratly archipelago*.³⁸

Filipina beranggapan, klaim Tiongkok atas wilayah perairan Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut. Atas dasar ini, pada Januari 2013, Filipina menentang Tiongkok dengan membawa kasus ini ke pengadilan internasional di Den Haag. Meski demikian, kemudian Tiongkok menolak keputusan dan menyebutnya "selembar kertas yang ditakdirkan untuk menjadi sia-

³⁶Huong Le Thu, *The long and winding way to the Indo-Pacific*. <https://www.aspistrategist.org.au/the-long-and-winding-way-to-the-indo-pacific/> (diakses pada 20 Juli 2020).

³⁷ *Ibid.*

³⁸ China telah memulai strategi keamanan laut dan mengembangkan fasilitas angkatan laut di sejumlah wilayah perairan yang penting. NineDash-Line (NDL), One-Belt-One-Road (OBOR), dan Belt Road Initiatives (BRI) adalah di antara strategi yang dilakukan oleh China untuk mempromosikan integrasi ekonomi (Hou et Al. 2018) dan untuk menghubungkan ekonomi global (Yan 2018). Tindakan yang paling nyata yang diambil oleh pemerintah Cina adalah militerisasi jalur air di sekitar Spratly archipelago (Phillips 2018) yang menurut seorang perwira angkatan laut Cina, dibangun untuk itu terutama tujuan sipil, dan itu bisa ditingkatkan menjadi tujuan militer jika China merasa terancam (Bodeen 2019). Keadaan ini telah meningkatkan perhatian sejumlah negara yang terancam secara langsung karena wilayahnya sebagian diklaim secara sepihak oleh China. Negara tersebut adalah Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam dalam Sri Yunanto dan Galby Rifqi Samhudi, "Different Interests Explain Different Proposals: The Contestation of Indo-Pacific Cooperation Framework between ASEAN and the US," *Jurnal Global & Strategis* 13, no. 2 (25 November 2019): 1, <https://doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.1-16>.

sia" (Phillips, 2016).³⁹ Kemudian, pada 2 Maret 2011, dua kapal patroli China mengganggu kapal survei yang ditugaskan oleh Departemen Energi Filipina (DOE) untuk melakukan eksplorasi gas alam di Reed Bank (juga disebut Recto Bank) di daerah kepulauan Spratly yang diklaim oleh Filipina. Saat itu, Filipina mencari dukungan angkatan laut / udara Amerika di Spratly dengan meminta komitmen AS yang tegas untuk pertahanan dan keamanan Filipina sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pertahanan Bersama atau *Mutual Defense Treaty* (MDT) 1951.

Pada Januari 2012, Dialog Keamanan Bilateral antara AS-Filipina diadakan di Washington D.C. di mana pejabat asing dan pertahanan Filipina membahas perluasan kehadiran militer AS di negara tersebut. Pada 28 April 2014, mantan Menteri Pertahanan Gazmin dan Duta Besar AS untuk Filipina Philip Goldberg menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA) beberapa jam sebelum kemudian Presiden Barack Obama tiba di Manila untuk kunjungan kenegaraan pertamanya ke Filipina.

Beberapa percaya saat Filipina menghadapi Konflik Laut Cina Selatan, Filipina sangat dekat dengan AS dalam rangka mengantisipasi ancaman potensial dari Tiongkok tersebut. Secara historis, para pemimpin Filipina tidak suka campur tangan Amerika dalam urusan mereka, namun, terutama dalam beberapa tahun terakhir, mereka lebih mengkhawatirkan ancaman lain yang berpotensi lebih buruk, yang dirasakan, yang dekat secara geografis-yaitu China.⁴⁰ Namun nyatanya, Tiongkok sebagai ancaman potensial Filipina tidak menafikan kenyataan bahwa AS juga menjadi ancaman potensial bagi Filipina. Presiden Filipina Duterte di sela-sela KTT regional ASEAN di Laos pada tahun 2016, mengulangi kewaspadaannya terhadap AS dan

menyerukan pelatih militer AS untuk meninggalkan negara itu yang dia katakan adalah untuk kekhawatiran tentang keselamatan mereka.⁴¹

Filipina, terkesan tidak banyak berfokus pada geopolitik Indo-Pasifik, terutama sejak tahun 2016, namun nyatanya sejak 2010, kebijakan luar negeri Filipina disusun dengan memperhitungkan perkembangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dalam hal prospek kehilangan hak teritorial atau keuntungan ekonomi.⁴² Filipina pada satu saat dekat dengan AS, di waktu lain cenderung dekat dengan Tiongkok. Hubungan Filipina dengan Tiongkok dan AS mengalami pasang surut, Filipina mencoba menggunakan hubungannya dengan Tiongkok dan AS guna kepentingannya terkait teritori dan ekonomi. Filipina tidak selalu mempunyai hubungan yang buruk dengan Tiongkok dan tidak selalu dekat dengan AS. Sesungguhnya Filipina berupaya mengelola ancaman dengan mempertahankan sekutu mereka, baik AS dan Tiongkok dengan menerapkan strategi Tarik Ulur yang sangat rasional.⁴³

⁴¹ Christopher Woody, *The Philippines' brash president is playing a geopolitical game he can't afford to lose*, <https://www.businessinsider.com/philippines-geopolitical-balance-between-us-china-asia-2016-9?r=US&IR=T> (diakses pada September 2020).

⁴² Renato Cruz De Castro, "How Indo-Pacific Geopolitics Affects Foreign Policy: The Case of the Philippines, (2010-2017)" t.t., 133.

⁴³ Kebijakan aliansi Filipina tidak dapat dikatakan sebagai hedging, yang artinya berupaya mengimbangi dengan tidak memihak manapun ataupun menjalin keberpihakan pada kedua belah pihak baik AS maupun Tiongkok. Filipina di satu saat dekat dengan Amerika Serikat, namun di lain waktu menentang AS dan mendekat kepada Tiongkok. Renato Cruz De Castro menjelaskan pada awal masa jabatan enam tahunnya, Presiden Benigno Aquino III menjadi prihatin bahwa ekspansi maritim China mengancam hak teritorial Filipina atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut China Selatan. Dia kemudian mengejar kebijakan penyeimbangan terhadap ekspansi maritim China ke wilayah ini. Aquino menerapkan kebijakan ini sebagai reaksi terhadap ekspansi angkatan laut China, tetapi juga mempertimbangkan penyeimbangan kembali strategis Pemerintahan Obama ke Asia. Namun, Presiden Rodrigo Duterte

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Gregory Kupsky, *A Sea of Troubles: The Philippines and Pacific Geopolitics* (2020), <http://origins.osu.edu/article/sea-troubles-philippines-and-pacific-geopolitics> pada Agustus 2020.

Agenda kebijakan luar negerinya telah melibatkan pengembangan dan pemeliharaan sikap independen dan proaktif sehingga ia dapat dengan cekatan menyeimbangkan kekuatan utama di Asia Timur.⁴⁴

Saat AS mengancam, maka Filipina mendekat ke Tiongkok, sebaliknya jika Tiongkok tampak semakin menekan maka Filipina mendekat ke AS. Bagaimanapun sulit bagi Filipina mengandalkan kekuatan sendiri dalam melawan/menentang negara musuh seperti Cina, Taiwan dan AS yang beberapa kali memiliki konflik dengan Filipina.

Di masa Presiden Aquino, Filipina cukup dekat dengan AS, kemudian dimasa Duterte Filipina dekat dengan Tiongkok. Kedekatan Filipina dengan Tiongkok ini dimotivasi kepentingan ekonomi. Menurut salah satunya, Castro berasumsi bahwa hal ini disebabkan peluang kerjasama yang menjanjikan dari Tiongkok kepada salah satunya Filipina. (1) China akan menyediakan lebih banyak barang publik internasional melalui pengembangan konektivitas ke negara tetangganya di Asia; (2) kerjasama ekonomi akan disediakan untuk proyek darat dan maritim; (3) kerja sama akan ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur; dan (4) China akan memberikan US \$ 40 miliar untuk mendirikan Silk Road Fund.⁴⁵ Bagaimanapun, isu utama yang mempengaruhi musuh maupun teman potensial bagi Filipina didominasi oleh isu *maritime*.

Geopolitical Codes: Netralitas & Strategi Hedging di Asia Tenggara

sedang mengungkap agenda geopolitik pendahulunya di Laut Cina Selatan. Duterte telah mengejar kebijakan peredaan di China untuk memanfaatkan inisiatif One Belt, One Road (OBOR) Beijing. Lihat dalam Castro, "How Indo-Pacific Geopolitics Affects Foreign Policy: The Case of the Philippines, (2010-2017), 133.

⁴⁴ Renato Cruz De Castro, "How Indo-Pacific Geopolitics Affects Foreign Policy: The Case of the Philippines, (2010-2017)," t.t., 147

⁴⁵ *Ibid*, 145.

Kecenderungan Thailand, Malaysia, Myanmar, Laos, dan Kamboja adalah netral dalam merespons gagasan Indo-Pasifik. Thailand merupakan negara yang masuk ke dalam kategori cukup penting dalam *geopolitical agents* di kawasan Asia Tenggara. Kaitannya dengan aspek geopolitik, Thailand cenderung berfokus kepada stabilitas daratan Asia Tenggara daripada poros maritim. Stabilitas kawasan yang berurusan dengan Thailand tepatnya dengan negara tetangga seperti Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Instabilitas negara sekitar akan berpengaruh pada stabilitas Thailand sebagaimana yang terjadi dalam Perang Saudara Kamboja pada 1979-1989 dan konflik Kamboja-Thailand. Secara geografis, bagian barat dan utara terbentang dengan pegunungan yang membentuk batas antara Thailand dan Burma. Daerah ini diyakini sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Bagian timur yang berbatasan dengan Prancis Indo-China menyimpan sumber daya potensial. Bagian tengah terdapat lumbung padi yang menjadi sumber daya alam bagi penduduk setempat.

Menurut catatan NIDS, Thailand memiliki sejumlah permasalahan mulai dari perebutan wilayah dengan Kamboja, ancaman dari Myanmar, isu keamanan non tradisional seperti *drugs trafficking*, isu kesehatan, dan penyelundupan senjata, dan bencana alam.⁴⁶ Selain itu, yang terpenting Thailand menjadi salah satu negara yang memiliki konflik dalam laut Cina Selatan. Negara ini memiliki garis pantai yang panjang di Teluk dengan menduduki sebagian besar Semenanjung Indo-China dan Semenanjung Malaya. Teluk Benggala memisahkan Thailand dengan wilayah Burma yang panjang dan sempit. Dengan latar belakang geografis, Bangkok menjadi pusat penerbangan internasional sebagai titik

⁴⁶ Pavin Chachavalpongpun. 2012. *Years of Living Dangerously: Thailand's Current Security Challenges, 2012*, http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/joint_research/series6/pdf/05.pdf (diakses pada 4 Agustus 2020).

transit dengan kisaran enam belas maskapai penerbangan.

Thailand juga terlibat dalam kerjasama Sungai Mekong atau disebut Greater Mekong Subregion (GMS) — program kerja sama subregional di antara Provinsi Yunnan di China, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam — hambatan dari kerjasama ini bahwa meskipun rute fisik telah diselesaikan, dukungan peraturan dan administratif tidak memadai.⁴⁷ Dalam konteks kerjasama keamanan regional, Thailand bersikeras untuk melakukan promosi kerangka kerja ASEAN dan organisasi internasional lainnya untuk memastikan regional itu perdamaian dan keamanan dijaga.

Atas dasar ragam ancaman yang dihadapi Thailand, negara ini pun kemudian menjadikan baik AS, Tiongkok, dan Asia Tenggara sebagai teman. Thailand memilih sikap pro terhadap prinsip ASEAN akan area bebas nuklir (ZOPFAN), namun dalam beberapa hal Thailand, sulit mempercayai ASEAN. Contohnya dalam banyak kesempatan, negara ini telah menolak tawaran ASEAN untuk menjadi penengah konflik bilateral dengan negara tetangga (kasus Kamboja) dan masalah pemberontakan di daerah selatan Thailand. ASEAN, Thailand menggunakan prinsip non intervensi dalam TAC ASEAN untuk menolak mediasi dari ASEAN.

Thailand tetap menjadikan ASEAN sebagai “teman”, sembari tidak menafikan upaya pembangunan kerjasama militer baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok. Thailand memiliki program latihan militer tahunan mereka yang dikenal sebagai Cobra Gold dengan AS. Pada tahun 2003, Thailand dianugerahi status sekutu utama non-NATO — sebuah langkah yang dianggap lebih jauh

dalam hubungan Thai-AS. Sementara itu, negara ini juga memulai hal serupa dengan Tiongkok. Thailand mempunyai latihan gabungan militer dengan China baru-baru ini, sebagai bagian dari perluasan kemampuan pertahanannya.

Secara ekonomi, Thailand memiliki teman potensial yaitu Jepang. Thailand memiliki ekspor utama adalah beras, timah, karet, kayu jati arci sedangkan tekstil, bahan makanan, manufaktur logam, bahan bakar minyak, mesin, tembakau, dan benang adalah impor utama.⁴⁸ Utamanya ekspor disuplai kepada Singapura, India, Hong Kong, dan Inggris; sebagian besar negara importir. Kekhawatiran Amerika dan Inggris mulai hilang ketika industri kembali bangkit di Jepang sebagai mitra dagang Thailand. Keberhasilan Jepang tersebut disambut baik oleh Jepang itu sendiri, karena perdagangannya kembali kondusif. Thailand saja merasa kagum dengan keterampilan industri Jepang, bahkan Jepang merupakan negara yang menentang negara lain selama Perang Dunia I berlangsung. Sebenarnya Jepang tidak memiliki hak dagang khusus, namun kedekatannya dengan Thailand membuat Jepang kian beruntung dalam hal perdagangan. Dalam agenda Indo-Pasifik Jepang, maka Thailand ditargetkan dalam program Disaster Prevention and Management, Transportation. Kerja sama ini mencoba meningkatkan konektivitas dan pembangunan berkelanjutan antara Jepang dengan Thailand.

Malaysia akan memaknai keberadaan Indo-Pasifik dan menempatkan dirinya sebagai negara dengan posisi di tengah-tengah secara geografis karena ia harus menyediakan keamanan jalur laut di Selat Malaka yang dilintasi oleh kapal-kapal negara yang menginisiasi gagasan Indo-Pasifik, China, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Malaysia juga menyadari tanggung jawabnya dalam menangani ancaman-ancaman keamanan di Selat

⁴⁷ Kaewkamol Karen Pitakdumrongkit, “The Impact of the Trump Administration’s Indo-Pacific Strategy on Regional Economic Governance,” (April 2019), <https://www.eastwestcenter.org/publications/the-impact-the-trump-administration%E2%80%99s-indo-pacific-strategy-regional-economic>. hal. 27, (diakses pada Agustus 2020).

⁴⁸ Joseph S. Roucek, “The Geopolitics of Thailand,” *The Social Studies*, 45:2, 57-63, (2015) DOI: 10.1080/00220973.1939.11017793

Malaka, yaitu perompakan, terorisme, dan IUU Fishing.⁴⁹ Setidaknya, pernyataan Duta Besar Jepang untuk Malaysia, Hiroshi Oka, bahwa “*Not to forget is the maritime connectivity for the safe navigation of vessels, under the free and open Indo-Pacific region*”⁵⁰ menguatkan asumsi ini.

Akan tetapi, sumber lain justru menyatakan bahwa, sejauh ini, para pemimpin Malaysia cenderung tidak angkat bicara terkait ide Indo-Pasifik ini. Pandangan terakhir ini didasarkan pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Malaysia pada Juni 2019, *Foreign Policy Framework of The New Malaysia: Change in Continuity*⁵¹; yang mana di dalam dokumen ini tidak ada pembahasan atau narasi yang berkaitan dengan Indo-Pasifik.⁵² Dengan kata lain, Malaysia memposisikan dirinya sebagai aktor yang ‘netral’ dengan lebih terkesan berperilaku ‘*wait and see*’ terhadap gagasan Indo-Pasifik.⁵³

Myanmar telah lama memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Tiongkok. Tiongkok mempercepat Koridor Ekonomi China-Myanmar (CMEC) dan meningkatkan hubungan bilateral sebagai bagian dari “komunitas takdir bersama,” Tiongkok dan Singapura pada tahun 2018

adalah mitra dagang teratas bagi Myanmar.⁵⁴ Namun, terutama sejak konsepsi Indo Pasifik kembali mengemuka, Myanmar menjalin hubungan kerjasama yang juga intensif dengan India dan Jepang. Myanmar memiliki daya tarik sendiri bagi India dan Jepang.

Myanmar memiliki hubungan kerjasama militer dengan India. Myanmar diantaranya telah membeli kapal selam Kilo buatan Rusia dari Angkatan Laut India, melakukan peningkatan persenjataan Myanmar, dan mendapat pelatihan perwira militer dari India, bahkan dalam hal menghadapi ancaman eksternal, India adalah satu-satunya mitra yang dapat dipercaya oleh Myanmar.⁵⁵ Pimpinan Myanmar Tatmadaw sering mengunjungi India untuk bertukar pengetahuan, menjaga momentum reformasi struktural dan mempelajari federalisme India dan pengaturan keamanan federal. Bagi India melalui hubungan kerjasama militer dengan angkatan laut Myanmar, berarti juga menjaga keamanan Samudra Hindia dari Ekspansi Tiongkok yang merupakan inti dari strategi besar Indo-Pasifik. Bagaimanapun terkait Indo-Pasifik dan Tiongkok, Myanmar sesungguhnya masih belum memiliki kebijakan yang jelas untuk terlibat dalam strategi ini, karena konsep inti “Indo-Pasifik” masih dibangun secara longgar dan ditafsirkan secara berbeda di kawasan ini.⁵⁶

Namun, tingkat kemitraan strategis ini tidak menyiratkan bahwa Myanmar akan bergabung dengan kemitraan Indo-Pasifik. Hubungan bisnis dan investasi besar India di Myanmar, proyek Kaladan di negara bagian Rakhine, masih terkatung-katung karena krisis Rohingya dan konflik yang sedang berlangsung antara Tentara Arakan dan Tatmadaw. Selain itu, India juga membantu Myanmar install coastal radars in the Bay of Bengal yang melalui kerjasama ini India juga

⁴⁹ Tharishini Krishnan, *Navigating Malaysia into the Indo-Pacific Stream*, (2020) https://www.researchgate.net/publication/337160015_Navigating_Malaysia_into_the_Indo-Pacific_Stream (diakses pada 3 September 2020).

⁵⁰ Malaysia lynchpin for Indo-Pacific connectivity, <https://www.nst.com.my/news/nation/2020/02/569672/malaysia-lynchpin-indo-pacific-connectivity>, (diakses pada September 2020).

⁵¹ Ministry of Foreign Affairs Malaysia, *Foreign Policy Framework of The New Malaysia Change in Continuity*, (2019), <https://www.kln.gov.my/foreign-policy-framework/files/assets/common/downloads/Foreign%20Policy%20Framework.pdf> (diakses pada 4 Agustus 2020).

⁵² Cheng-Chwee Kuik, Research Report: Mapping Malaysia in the Evolving Indo-Pacific Construct, (CSCAP Regional security Outlook: *Council for Security Cooperation in the Asia Pacific*, 1 January 2019).

⁵³ Tharishini Krishnan, Malaysia’s Posture in the Indo-Pacific Construct. *Journal of Asian Economic Integration*, Volume 2, Issue 2, (18 Agustus 2020)

⁵⁴ “Kliem, *ASEAN’s Indo-Pacific Dilemma Where to from Here.pdf*,” t.t., 4, (2019).

⁵⁵ Amara Thiha is the Senior Research Manager at the Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS) and a nonresident fellow at the Stimson Center. <https://thediplomat.com/2020/02/myanmars-india-balancing-act/> (diakses pada 20 Agustus 2020).

⁵⁶ *Ibid*.

menerima data radar dari jaringan yang dibangunnya di Samudra Hindia.⁵⁷ Meskipun begitu, jelas bahwa tanpa ikatan bisnis yang kuat, kemitraan strategis saja tidak cukup. Kendala kebijakan luar negeri, kurangnya kepentingan ekonomi, dan hubungan dekat Naypyidaw dengan Beijing telah menjadikan kerja sama Indo-Pasifik hanya sebagai opsi alternatif di tingkat strategis.⁵⁸ India juga sebetulnya tidak bertentangan langsung dengan Tiongkok, karenanya hubungan dengan India tidak merugikan hubungan Myanmar dengan Tiongkok. India bagi Myanmar bahkan dapat digunakan untuk mengimbangi hegemoni Beijing melalui hubungan ekonomi.

Myanmar tidak langsung secara frontal mengumumkan keberpihakan pada konsep *A Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang dimotori AS, namun Myanmar bukan mustahil dapat menjadikan Australia, AS, dan Jepang sebagai mitra potensial. Jepang bahkan telah memperlihatkan ketertarikannya terhadap Myanmar.

Dalam catatan *Japan's Initiatives For Partners* disebutkan beberapa proyek yang ditargetkan Jepang terkait Indo-Pasifik dengan Myanmar, di antaranya:

- “*Thilawa Special Economic Zone (SEZ)*, Jepang dan Myanmar bekerjasama dalam membangun *industrial zones and surrounding infrastructure such as electricity, roads, ports, water supplies and telecommunications*),
- Upgrading of Yangon-Mandalay Railway melalui *Speeding up rail operation and strengthening transportation capacity of cargo and passengers by rehabilitating dilapidated railway*.
- Proyek *The travel time from Yangon to Mandalay will be shortened: 15 → 8 hours*.

- *Project for the Development of Mandalay Port* yang berbicara masalah *The volume of cargo will increase mulai dari 0 → 200,000 tons*.
- *The mooring period of ships will be shortened dari 2 weeks menjadi 6-24 jam*.
- Myanmar dan Japan melaksanakan *the Project of Capacity Development for National Single Window and Customs Modernization by Introducing Automated Cargo Clearance System in Myanmar (MACCS)* terkait promosi fasilitas perdagangan dan keamanan perdagangan.
- Dalam isu lingkungan dan kesehatan, Jepang juga berminat pada kerjasama dengan Myanmar dan negara disekitar Sungai Mekong.”⁵⁹

Myanmar sesungguhnya memiliki ancaman potensial, yang datang dari dalam dometisknya. Berbagai masalah junta militer dan Rohingnya, menyebabkan Myanmar menjadi negara yang tak luput dari intervensi negara asing. Masa junta yang menyebabkan isolasi membuat ekonomi Myanmar memburuk. Oleh karenanya isu utama bagi Myanmar secara rasional berkaitan dengan perbaikan ekonomi. Pengalaman Rohingnya telah menyebabkan turunya investor asing di Myanmar. Dapat dipahami, jika Myanmar cenderung akan merangkul semua negara. Dalam kaitanya dengan Indo-Pasifik, Myanmar lebih tertarik pada isu ekonomi, sehingga sikap geopolitik Myanmar dipengaruhi oleh negara yang kemudian mendekat dan menjanjikan hubungan kerjasama ekonomi.

Kerangka ASEAN bagi negara-negara CLMV salah satunya Myanmar akhirnya juga menjadi arena mengakomodir kepentingan politik. Sebaliknya, kesepakatan bilateral dapat lebih menguntungkan. Suatu negara anggota ASEAN mungkin merasakan persaingan yang lebih besar daripada kerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya, kerangka kerja nasional-bilateral

⁵⁷ Darshana M Baruah, *India in the Indo-Pacific: New Delhi's Theater of Opportunity* (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2020); Hal.17.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ The Government of Japan, *Towards Free and Open Indo-Pacific*, (November 2019). <https://www.mofa.go.jp/files/000407643.pdf>, (diakses pada 13 Agustus 2020).

dapat mendorong suatu negara untuk tunduk pada keinginan kekuatan yang lebih besar.⁶⁰

Oleh karena itu, di masa depan hubungan Myanmar dengan aktor di luar kawasan Asia Tenggara dapat lebih potensial dan intensif ketimbang dengan negara di Asia Tenggara. Prioritas berikutnya untuk proyek-proyek ini adalah untuk mengukur persyaratan kesepakatan terhadap AOIP dan memastikan bahwa ASEAN konsisten dengan prinsip keterbukaan dan inklusivitasnya. Ini akan mengurangi pengaruh yang diterima donor bilateral atas rencana nasional dan regional. Meskipun AOIPs sebagai kerangka konsep Indo-Pasifik versi ASEAN masih berkaitan erat dengan norma lama ASEAN yaitu *Treaty of Amity and Cooperation* namun munculnya Indo-Pasifik membuka peluang baru bagi negara Asia Tenggara untuk dapat mendapat jaminan keamanan dan peluang manfaat ekonomi. Di satu sisi, untuk kepentingan politis berkaitan dengan isu seperti Hak Asasi Manusia maka ASEAN akan dikedepankan, namun berkenaan dengan isu kedaulatan dan ancaman yang serius terutama saat ASEAN tak dapat diharapkan maka kerjasama Indo-Pasifik terutama struktur *A free and Open Indo-Pacific* usungan AS dan Jepang dapat menjadi alternatif yang utama.

Laos adalah negara yang tidak banyak memberikan rekasi terhadap gagasan Indo-Pasifik. Hal ini disebabkan, karena ancaman bagi Laos lebih banyak datang dari dalam kawasan, yang utamanya focus pada pembangunan ekonomi. Laos merupakan negara dataran yang cukup terkunci, mulai berubah menjadi negara yang tumbuh dengan memperbanyak kerjasama ekonomi dengan negara sekitar.⁶¹

Laos atau The Lao PDR menjadi salah satu negara di Asia Tenggara, yang memiliki kedekatan dengan Tiongkok. Laos memiliki kerangka kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, misalnya proyek kereta api berkecepatan tinggi Vientiane-Kunming sepanjang 414-kilometer antara Tiongkok dan Laos. Kedekatan Laos dengan Tiongkok, di satu sisi memberi keuntungan potensial bagi Laos. Namun, di sisi lain, banyak juga yang meragukan manfaat kerja sama ini karena ketidakmampuan Laos membayar hutang dan permasalahan tanah yang diambil alih oleh Tiongkok. Mengenai program kereta cepat Sino-Laos, pengamat mengajukan pertanyaan tentang kelayakan komersial proyek, kemampuan Laos untuk membayar kembali pinjaman, dan masalah tanah yang diambil alih (Hutt 2018). Proyek ini bernilai US \$ 6 miliar, yang berarti sekitar setengah dari PDB negara bagian 2016 sebesar US \$13,7 miliar, dan bahwa Beijing mencapai kesepakatan dengan Laos untuk mengambil tanah sejauh 50 meter di setiap sisi lintasan (Janviroj 2017).⁶²

Di masa depan, Laos mungkin menempuh jalan yang sama dengan kebanyakan negara di Asia Tenggara dengan menerapkan hedging yaitu merangkul semua kekuatan dunia, baik AS maupun Tiongkok. Laos tetap tidak dapat menafikan Tiongkok terutama mengingat keuntungan yang didapat dari Belt and Road Initiatives (BRI). Negara anggota ASEAN, banyak menyambut baik BRI/OBOR sebagai cara untuk meningkatkan konektivitas melalui infrastruktur yang lebih baik, tetapi BRI/OBOR juga dituduh menciptakan perangkat utang dan digunakan sebagai alat untuk ambisi Beijing dalam membangun

⁶⁰ Simon Tay dan Jessica Wau. East Asia Forum Quarterly, 'Middle power game', Vol. 12, No. 1, (2020). <https://www.eastasiaforum.org/2020/04/20/the-indo-pacific-outlook-a-new-lens-for-asean/> (diakses pada 20 September 2020).

⁶¹ Pana Janviroj, 2017. "Laos; from land locked to land linked." *e Nation*, (September 12, 2017). http://www.nationmultimedia.com/detail/big_read/30326442.

⁶² Kaewkamol Karen Pitakdumrongkit , , "The Impact of the Trump Administration's Indo-Pacific Strategy on Regional Economic Governance," (24 April 2019); 24. <https://www.eastwestcenter.org/publications/the-impact-the-trump-administration%E2%80%99s-indo-pacific-strategy-regional-economic> (diakses pada Agustus 2020).

dunia Sinosentris.⁶³ Oleh karena itu Laos juga mulai membangun hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat telah membuat kesepakatan perdagangan bilateral yang berisi ketentuan investasi dengan ekonomi negara regional Korea Selatan (KORUS) dan Laos (Perjanjian Hubungan Perdagangan AS-Laos) (Departemen Luar Negeri AS 2018a, 2018b; UNCTAD 2018).⁶⁴

Amerika Serikat dapat menjadi mitra potensial bagi Laos di masa depan, terutama dalam penciptaan keberlanjutan penyelesaian ancaman utama bagi Laos yang berkaitan dengan Sungai Mekong. Greater Mekong Subregion (GMS) —program kerja sama subregional di antara Provinsi Yunnan di China, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam — mengungkapkan bahwa meskipun rute fisik telah diselesaikan, dukungan peraturan dan administratif tidak memadai.⁶⁵

Hubungan antara Laos dan AS terutama dapat dilihat pada tahun 2018. AS bahkan mulai melakukan pendekatan kepada Laos terkait konsep FOIP Indo-Pasifik. Pada 14-16 Oktober 2018 misalnya, seorang pejabat senior dari Departemen Luar Negeri AS mengunjungi Laos untuk meninjau kemajuan lanjutan dalam hubungan bilateral dan untuk memberi pengarahan kepada pejabat Laos tentang Strategi Indo-Pasifik AS.⁶⁶ Jika Laos mampu meningkatkan iklim bisnis negaranya, maka AS memberikan peluang

peningkatan investasi dari AS. Wakil Asisten Sekretaris (DAS) Walter Douglas dari Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik AS bertemu dengan Wakil Menteri Thongphat Inthavong dari Kementerian Energi dan Pertambangan Laos dan menyatakan Strategi Indo-Pasifik adalah seperangkat aturan dan prinsip yang menghormati kedaulatan dan aspirasi semua negara di kawasan ini. “Sangat penting untuk memiliki lingkungan yang terbuka, adil, dan transparan untuk perdagangan dan investasi, karena kami mempromosikan pembangunan berkelanjutan.”⁶⁷ Jepang juga menjanjikan *quality infrastructure* dalam *Project for Reconstruction of the Bridges on National Road No.9* sebagai bagian proyek peningkatan kerja sama Indo-Pasifik Jepang.⁶⁸

Dari segi sikap, dapat dikatakan, Kamboja secara eksplisit merupakan negara pertama yang menyatakan untuk mendukung strategi Jepang dalam Indo-Pasifik atas dasar persepsi Kamboja terhadap Jepang yang dianggap sebagai *benign power* (kekuatan jinak) yang mengusung dimensi pengembangan ekonomi dan juga telah dan akan membantu Kamboja dalam upaya *peacekeeping* dan *peacebuilding* serta integrasi di kawasan.⁶⁹ Sikap Kamboja ini nyata-nyata selain tertuang di *The Phnom Penh Declaration* dengan narasi “*The support of the “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific” as a means to complement regional cooperation and to help promote an enabling environment for peace, stability and prosperity*”,⁷⁰ juga terlihat dari pernyataan

⁶³East Asia Forum,
<https://www.eastasiaforum.org/2020/04/20/the-indo-pacific-outlook-a-new-lens-for-asean/> (diakses pada September 2020).

⁶⁴ Kaewkamol Karen Pitakdumrongkit, “The Impact of the Trump Administration’s Indo-Pacific Strategy on Regional Economic Governance,” (24 April 2019); 24.
<https://www.eastwestcenter.org/publications/the-impact-the-trump-administration%E2%80%99s-indo-pacific-strategy-regional-economic> (diakses pada Agustus 2020).

⁶⁵ Pitakdumrongkit, 27.

⁶⁶Senior US official meets Lao Government to discuss Indo Pacific Strategy.
<https://la.usembassy.gov/senior-u-s-official-meets-with-lao-government-to-discuss-indo-pacific-strategy/> (diakses pada 15 Agustus 2020).

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ The Government of Japan. November 2019. Towards Free and Open Indo-Pacific diakses melalui (<https://www.mofa.go.jp/files/000407643.pdf>) pada 13 Agustus 2020.

⁶⁹ Chheang Vannarith, *Cambodia supports Japan’s Indo-Pacific Strategy*, (2019).
<https://www.khmertimeskh.com/605150/cambodia-supports-japans-indo-pacific-strategy/> (diakses pada 4 Oktober 2020).

⁷⁰ Kingdom of Cambodia, The Phnom Penh Declaration, (2019).
http://g01.upf.org/events/20191121-CambodiaSummit/Phnom_Penh_Declaration.pdf (diakses pada 1 Oktober 2020).

Perdana Menteri Hun Sen bahwa ia mendukung penuh Jepang dalam konteks Indo-Pasifik pada *the 11th Mekong-Japan Summit* di Thailand, 4 November 2019.⁷¹ Besar kemungkinan, upaya Jepang hadir di dan memengaruhi Kamboja dalam bentuk dukungan pembangunan infrastruktur ini adalah wujud untuk mengimbangi pengaruh China khususnya di Kamboja dan di secara umum Asia Tenggara; selain itu, faktor geopolitis terkait dinamika di Laut China Selatan dimana sikap Beijing sangat terlihat mengemuka.⁷²

Simpulan dan Rekomendasi

Asia Tenggara adalah kawasan yang secara geografis berada di sisi sentral Indo-Pasifik, yakni wilayah maritim yang terbentang dari Samudra Hindia sampai Pasifik Barat, yaitu Asia termasuk Asia Barat/Timur Tengah hingga Eastern Afrika. Sentralitas dan netralitas merupakan aspek kunci yang kerap dibawa dan disuarakan oleh negara-negara Asia Tenggara terhadap negara-negara lain di Indo-Pasifik. Akan tetapi, apakah hal ini tetap menjadikan geopolitik ASEAN tetap sama sebelum gagasan ini muncul. Menarik untuk mengkaji bagaimana struktur dan posisi geopolitik negara-negara di Asia Tenggara pascamunculnya konsep Indo-Pasifik. Dengan memanfaatkan data sekunder terkait dimensi geografis kawasan Asia Tenggara yang utamanya dipublikasi oleh NIDS serta buku, jurnal, dan laman internet yang kredibel, penelitian ini menggunakan tiga konsep utama, yaitu *geopolitical agents*, *geopolitical structures*, dan *geopolitical codes*.

Selain ASEAN, juga terdapat sejumlah aktor/*agents* berupa negara yang

memiliki pengaruh dalam struktur geopolis, khususnya di Asia Tenggara dan bahkan di Indo-Pasifik secara umum, yakni Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Lima negara yang disebut ini didasarkan atas dua hal, yakni: *Pertama*, respon mereka terhadap gagasan Indo-Pasifik yang tertuang dari dokumen kebijakan yang mereka terbitkan. *Kedua*, ide atau bahkan agenda nasional mereka yang dikaitkan dengan konteks gagasan Indo-Pasifik. Dalam konteks Indo-Pasifik, kendatipun masing-masing negara tersebut sanggup membuat berbagai pilihan, tetapi mereka tidak dapat bertindak secara bebas karena ASEAN mewujudkan sebagai struktur yang, melalui aturan serta nilai-nilai yang ada di dalamnya, membatasi pelbagai tindakan mereka. Namun, ASEAN pun menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya.

Geopolitik Asia Tenggara dipengaruhi fragmentasi sikap negara negara anggota ASEAN yang berbeda dan cenderung tidak bersifat netral seperti biasanya terutama ketika menghadapi negara di luar ASEAN. Indo-Pasifik membawa perubahan geopolitik yang tidak hanya berorientasi pada maritim, namun juga dipengaruhi pertimbangan ekonomi dan politik.

⁷¹ Cambodia Supports Japan's Indo-Pacific Strategy. <http://m.en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/15806-2019-11-05-05-20-14.html> (diakses pada Oktober 2020).

⁷² Lihat The Diplomat, <https://thediplomat.com/2020/08/japan-seeks-to-offset-chinese-influence-in-cambodia/> (diakses pada 19 Oktober 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Baruah, Darshana M. *India in the Indo-Pacific: New Delhi's Theater of Opportunity*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2020.
- Berkofsky, Axel and Sergio Miracola (Ed). 2019. *Geopolitics By Other Means The Indo-Pacific Reality*. Milano: Ledizioni LediPublishing. p. 17.
- Cambodia Supports Japan's Indo-Pacific Strategy diakses melalui <http://m.en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/15806-2019-11-05-05-20-14.html>
- Chachavalpongpun, Pavin. 2012. *Years of Living Dangerously: Thailand's Current Security Challenges*. Diakses melalui http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/joint_research/series6/pdf/05.pdf pada 4 Agustus 2020
- Channel News Asia, <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/pm-lee-president-trump-renew-mou-on-us-use-of-military-11936182> (diakses pada 4 Agustus 2020).
- Chapman, Bert. *Geopolitics: a Guide to the Issues*. Santa Barbara: Praeger, 2011.
- Choong, William. 17 Juli 2019. *Indonesia, ASEAN and the Return of the Indo-Pacific Strategy* diakses melalui <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/indonesia-asean-return-indo-pacific-strategy/> diakses pada 10 Juli 2020
- De Castro, Renato Cruz. "How Indo-Pacific Geopolitics Affects Foreign Policy: The Case of the Philippines 2010-2017". *Rising Power Quarterly*. Volume 3, Issue 2 (Agustus 2018): 133-155
- Dodds, Klaus. *Geopolitics: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Dokumen final *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*. https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf (diakses pada Agustus 2020)
- East Asia Forum, <https://www.eastasiaforum.org/2020/04/20/the-indo-pacific-outlook-a-new-lens-for-asean/> (diakses pada September 2020).
- Flint, Colin, *Introduction to Geopolitics*. New York: Routledge, 2006.
- Huong Le Thu. *The long and winding way to the Indo-Pacific*, (29 Juni 2019). <https://www.aspistrategist.org.au/the-long-and-winding-way-to-the-indo-pacific/> (diakses pada 20 Juli 2020)
- Janviroj, Pana. "Laos; from land locked to land linked." *e Nation*, (September 12, 2017). http://www.nationmultimedia.com/detail/big_read/30326442 (diakses pada Agustus 2020).
- Kemenlu RI, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/539/berita/peran-sentral-indonesia-pada-asean-outlook-on-indo-pacific>, diakses pada 30 Desember 2022.
- Kemlu RI, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/821/berita/asean-outlook-on-indo-pacific-diperkenalkan-kepada-kanada#:~:text=ASEAN%20Outlook%20on%20Indo%2DPacific%20merupakan%20penegasan%20posisi%20ASEAN%20dalam,Asia%20Pasifik%20dan%20Samudera%20Hindia> (diakses pada 18 Juli 2020).
- Khurana, Gurpreet S. *Security of Sea Lines: Prospects for India-Japan Cooperation*. *Strategic Analysis*, 31:1, 139-153, (2007). Hal. 150.

- Kingdom of Cambodia. The Phnom Penh Declaration, (2019). http://g01.upf.org/events/20191121-CambodiaSummit/Phnom_Penh_Declaration.pdf (diakses pada Oktober 2020)
- Kliem. ASEAN's Indo-Pacific Dilemma Where to from Here. (2019)
- Krishnan, Tharishini. "Malaysia's Posture in the Indo-Pacific Construct". Journal of Asian Economic Integration. Volume 2, Issue 2, (18 Agustus 2020)
- Krishnan, Tharishini. *Navigating Malaysia into the Indo-Pacific Stream*. https://www.researchgate.net/publication/337160015_Navigating_Malaysia_into_the_Indo-Pacific_Stream pada 1 September 2020 (diakses pada 1 september 2020)
- Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN Plus Three Summit, Kuala Lumpur, 12 December 2005.
- Kuik, Cheng-Chwee. Research Report: Mapping Malaysia in the Evolving Indo-Pacific Construct. CSCAP Regional security Outlook: Council for Security Cooperation in the Asia Pacific, 1 Jan 2019.
- Kupsky, Gregory. *A Sea of Troubles: The Philippines and Pacific Geopolitics*. <http://origins.osu.edu/article/sea-troubles-philippines-and-pacific-geopolitics> (diakses pada Agustus 2020)
- Malaysia lynchpin for Indo-Pacific connectivity. <https://www.nst.com.my/news/nation/2020/02/569672/malaysia-lynchpin-indo-pacific-connectivity> (diakses pada Agustus 2020)
- Ministry of Foreign Affairs Malaysia. *Foreign Policy Framework of The New Malaysia Change in Continuity*, (2019). <https://www.kln.gov.my/foreign-policyframework/files/assets/common/downloads/Foreign%20Policy%20Framework.pdf> (diakses pada 4 Agustus 2020)
- Pitakdumrongkit, Kaewkamol Karen. "The Impact of the Trump Administration's Indo-Pacific Strategy on Regional Economic Governance," 24. (24 April 2019). <https://www.eastwestcenter.org/publications/the-impact-the-trump-administration%E2%80%99s-indo-pacific-strategy-regional-economic> (diakses pada Agustus 2020)
- Roucek, Joseph S. "The Geopolitics of Thailand." *The Social Studies*, 45:2, 57-63, (2015). DOI: 10.1080/00220973.1939.11017793
- Setnas ASEAN, <http://setnas-asean.id/news/read/konsep-indo-pasifik-asean-dan-kepemimpinan-indonesia> (diakses pada Februari 2020).
- Simon Tay dan Jessica Wau. *East Asia Forum Quarterly*, 'Middle power game', Vol. 12, No. 1 (2020), diakses melalui <https://www.eastasiaforum.org/2020/04/20/the-indo-pacific-outlook-a-new-lens-for-asean/>
- Stubbs, Richard, 2016. *Geopolitics and the Political Economy of Southeast Asia*. International Journal , Vol. 44, No. 3, Southeast Asia Ascendant (Summer, 1989). Kanada: Sage Publications.
- The Diplomat, <https://thediplomat.com/2020/02/myanmars-india-balancing-act/> (diakses pada Oktober 2020)
- The Diplomat, <https://thediplomat.com/2020/08/japan-seeks-to-offset-chinese-influence-in-cambodia/> (diakses pada Oktober 2020)
- The Government of Japan. *Towards Free and Open Indo-Pacific*, (November 2019). (<https://www.mofa.go.jp/files/000407643.pdf>) (diakses pada 13 Agustus 2020).
- The World Bank, <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/SGP/Year/LTST/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country> (diakses pada September 2020).

- Tuathail, Gearóid Ó, "Introduction: Thinking Critically about Geopolitics" di dalam Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby, and Paul Routledge, *The Geopolitics Reader*. New York: Routledge, 1998, 1.
- U.S. Embassy in Laos, <https://la.usembassy.gov/senior-u-s-official-meets-with-lao-government-to-discuss-indo-pacific-strategy/> (diakses pada 15 Agustus 2020)
- Vannarith, Chheang. Cambodia supports Japan's Indo-Pacific Strategy (2019). <https://www.khmertimeskh.com/605150/cambodia-supports-japans-indo-pacific-strategy/> (diakses pada Agustus 2020)
- Verico, Kiki, The National Bureau of Asian Research, <https://www.nbr.org/publication/how-indonesia-sees-the-indo-pacific-economic-architecture/>, diakses pada 30 Desember 2022.
- Woody, Christopher. *The Philippines' brash president is playing a geopolitical game he can't afford to lose*, 18 September 2016.. <https://www.businessinsider.com/philippines-geopolitical-balance-between-us-china-asia-2016-9?r=US&IR=T> (diakses pada September 2020).
- WTO, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/SG_e.pdf (diakses pada Oktober 2020).
- Yunanto, Sri dan Galby Rifqi Samhudi, "Different Interests Explain Different Proposals: The Contestation of Indo-Pacific Cooperation Framework between ASEAN and the US," *Jurnal Global & Strategis* 13, no. 2 (25 November 2019): 1. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.1-16> (diakses pada September 2020)